



ASPIRASI MASYARAKAT

## Warga Banyak Adukan Penahanan Ijazah

UMBULAHRIJO—Aduan warga Kota Jogja terkait dengan ijazah sekolah yang tertahan dan kepesertaan BPJS Kesehatan mendominasi laporan yang diterima DPRD Kota Jogja sepanjang 2025. Masalah ini umumnya dialami warga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Lulusan sekolah swasta menjadi kelompok yang paling terdampak karena masih memiliki tunggakan biaya pendidikan. Akibatnya, ijazah tidak dapat diambil meski siswa telah menyelesaikan pendidikan.

DPRD bersama Pemkot Jogja mengambil langkah melalui pemanfaatan Jaminan Pendidikan Daerah untuk membantu penyelesaian tunggakan. Sementara itu, lonjakan permintaan BPJS PBI dinilai menjadi sinyal tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Jogja, Wisnu Sabdono Putro, menyebut kasus ijazah tertahan banyak dialami lulusan sekolah swasta karena masih memiliki tunggakan biaya pendidikan. Kondisi itu membuat lulusan tidak bisa mengambil ijazah meski sudah dinyatakan lulus.

"Ijazah dan BPJS itu yang paling sering. Soal ijazah, tidak bisa mengambil karena kurang bayar. Rata-rata terjadi di sekolah swasta karena memang ada kewajiban pembayaran," ujar Wisnu, Rabu (17/12).

Wisnu menyebut jumlah laporan yang masuk cukup banyak dan tersebar di masing-masing fraksi DPRD. Ia mengungkapkan, aduan tersebut hampir setiap hari diterima oleh para anggota Dewan.

Selain ijazah, persoalan BPJS Kesehatan juga menjadi keluhan utama warga. Banyak warga yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri meminta dialihkan menjadi peserta BPJS Pemerintah. "Keluhan lain itu BPJS. Banyak warga yang sebelumnya pakai BPJS Mandiri minta pindah ke BPJS pemerintah. Banyak masyarakat kita mengajukan hal itu," katanya.

Menurut Wisnu, kondisi tersebut tidak lepas dari situasi perekonomian warga yang lesu. Meski demikian, ia enggan menarik kesimpulan terlalu jauh. "Kalau ditanya apakah ini menunjukkan ekonomi menurun, saya kurang tahu persis. Tapi memang kondisi ekonomi sekarang terasa agak lesu," ucapnya.

Untuk merespons aduan ijazah tertahan, pihaknya bersama Pemkot Jogja mengambil langkah konkret melalui pemanfaatan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Skema itu digunakan untuk membantu biaya pendidikan keluarga tidak mampu agar ijazah bisa diambil.

"Kami bergerak mengambil ijazah lewat Jaminan Pendidikan Daerah. Pemkot punya JPD untuk bantuan biaya pendidikan, dan itu kami gunakan agar ijazah mereka bisa dibawa pulang," katanya.

Wisnu menegaskan penahanan ijazah tidak dibenarkan, baik di sekolah negeri maupun swasta. Meski ada kasus tunggakan besar, DPRD mendorong solusi negosiasi pembayaran agar hak siswa tetap terpenuhi. *(Antara/Papar-Hidayat)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005